

WORKSHOP
“PERUMUSAN MATRIKS TARGET CAPAIAN USULAN RENCANA AKSI KETERBUKAAN DATA PEMILU”
16 November 2022, Pukul 13.00
Hotel Atlet Century Park, Jakarta

Amalia Salabi

Workshop ini merupakan kelanjutan workshop tanggal 20 September mengenai data-data pemilu yang dapat dibuka. Dalam Workshop hari ini akan merumuskan matriks target capaian usulan rencana aksi keterbukaan data pemilu.

Maharddhika

Hasil workshop pertama, terdapat 5 data pemilu dalam usulan aksi keterbukaan data pemilu, yaitu data dapil, dana kampanye, informasi parpol yang diinput ke Sipol, Hasil (Sirekap), data calon. Kami ingin mensinkronkan dengan rencana kerja KPU, sehingga bisa berkolaborasi memperkuat apa yang menjadi rencana kerja KPU.

Indra (Bappenas)

Pemilu 2024 menjadi pemilu yang lebih baik dari pemilu sebelumnya, khususnya terkait keterbukaan data pemilu. Keterbukaan data pemilu ada normanya dalam Undang-Undang Pemilu dan harus dilaksanakan terkait dengan kepercayaan publik (*public trust*), dan mengurangi potensi konflik hasil pemilu, Keterbukaan data pemilu bisa menghapuskan keraguan dari proses pemilu, dari tahapan pemilu. Dukungan keterbukaan data pemilu jangan menjadi beban tambahan bagi penyelenggara pemilu.

Tugas kita meningkatkan kualitas data, kelengkapan data, integrasi data dari portal pemilu KPU. Ada ketentuan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi, tidak 100% data dapat dibuka, tetapi data harus dibuka berdasarkan undang-undang, salah satunya untuk membuka public trust terhadap hasil pemilu dan proses pemilu. Jangan sampai RAN OGI di bidang kepemiluan membebani KPU, tetapi harus membantu KPU. Dulu Pusdatin belum ada di KPU dan adanya Pusdatin sekarang ini merupakan komitmen KPU.

Keluhannya sekarang sistem informasi KPU belum terintegrasi secara real time. Strategi: kolaborasi Sekretariat OGI, KPU, Bappenas dan Perludem. 2024 tugasnya berat, karena pemilihan kepala daerah ada pada tahun yang sama dengan pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD. Karena baru pertama kali diperlukan contingency plan. KPU banyak mendapatkan masalah terkait pergantian komisioner di tengah tahapan, RAN OGI seharusnya mempermudah dan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Tugas kita meminimalisir konflik hasil pemilu dengan keterbukaan data yang terintegrasi. Kami siap membantu implementasi keterbukaan informasi data pemilu, tinggal teknisnya untuk membantu KPU.

Theodorus Agustinus Hasiholan (Sekretariat Nasional OGI)

Kami menyusun rencana aksi nasional keterbukaan pemerintah dari tahun 2011-2022. Kami mengidentifikasi pemilu sebagai isu strategis dalam rencana aksi nasional OGI periode 2023-2024.

Usulan Perludem: komponen data yang perlu disediakan: peta dapil, profil partai politik, profil peserta pemilu, laporan dana kampanye peserta pemilu, hasil pemilu.

Pusdatin KPU akan mempublikasikan data dalam Open Data setelah adanya penetapan terkait data-data KPU.

Darwanto (Fasilitator)

Perludem pernah mendapatkan penghargaan di Paris terkait keterbukaan data dan ini merupakan modalitas yang kuat. Data-data pemilu dalam format data terbuka juga dapat diakses oleh disabilitas. Data pemilu tersebut terdiri atas:

- a. Peta daerah pemilihan
- b. Profil partai politik
- c. Profil peserta pemilu
- d. Laporan dana kampanye peserta pemilu
- e. Hasil pemilu

Kita punya modalitas cukup besar, mimpi yang besar, tetapi juga memiliki tantangan yang cukup banyak.

Tantangan di KPU:

- anggaran,
- undang-undang baru, yaitu Undang-undang PDP (Perlindungan Data Pribadi, meski baru berlaku 2024),
- bagaimana difabel dapat terfasilitasi terhadap data pemilu.

Tantangan apa saja yang akan dihadapi 2023-2024?

Maharddhika

Di workshop pertama kita sudah mencoba mengidentifikasi apa tantangan, opportunity, strength, weakness, threat.

Hadar Nafis Gumay (Netgrit)

Datanya ada di penyelenggara pemilu, tantangannya apakah penyelenggara pemilu tidak membuka datanya?

Staf KPU

Semua data di KPU sudah bisa diakses.

Peserta

Data sipol sudah dimirroring, masyarakat bisa mengakses. Ada data yang tidak sesuai prinsip open data, anggaran dasar partai, data anggota tidak bisa diklik/dibuka. Perlu komitmen lebih besar lagi untuk mendorong agar data disajikan sesuai prinsip open data.

Peserta

Data caleg, masyarakat masih terkendala dalam mengakses Silon, perlu ada edukasi, informasi mengenai data caleg. KPU sudah menyediakan form data pribadi, yang perlu difokuskan potensi konflik kepentingan, program kerja selama 5 tahun, tidak hanya visi misi. Motivasi pencalonan seringkali diisi ngawur. Program kerja selama 5 tahun, perlu regulasi agar caleg mengisi dengan serius. Dampaknya pemilih akan menjadi rasional, bukan memilih karena politik uang.

Theo

Bagaimana KPU memproses data ini? Pusdatin KPU agar menjelaskan prioritas data apa saja yang akan dibuka KPU?

Staf KPU

Pertanyaan ditampung dulu. Terkait anggaran, disediakan di setiap biro. Dalam pertemuan di kantor Perludem, akan dilakukan pengembangan, sedetail apa data apa yang akan dibuka, akan dilaporkan ke pimpinan.

Darwanto (Fasilitator)

Dalam Forum Satu Data, masyarakat sipil duduk di sana, untuk menyampaikan data-data apa yang diperlukan untuk dibuka. KPU mendukung dari sistem informasi yang sedang dikembangkan. Aksesibilitas disabilitas terhadap data pemilu juga sedang dikembangkan. KPU sudah berkomitmen, tetapi sejauh mana dikembangkan akan didiskusikan.

Hadar Nafis Gumay (Netgrit)

Sistem yang dimiliki KPU sekarang sudah semakin baik. Data-data itu sudah seharusnya dalam digital, sehingga mempublikasikan tidak sulit. Data sudah terkumpul sejak mendaftarkan diri, sekarang

pertanyaannya mengapa data itu tidak dibuka? Keluhannya kurang orang, sehingga perlu membantu agar mereka cepat mengolah dan menampilkan. Kunci: cara pandang untuk menampilkan data dengan segera.

Darwanto (Fasilitator)

Perlu penguatan SDM dalam melakukan pengolahan data.

Maharddhika

Usulan Perludem dari beberapa kali meeting, mengapa kami membagi capaian-capaian dengan waktu tahapan. Idealnya data ada, pada saat tahapan. Misalnya, pada saat calon ditetapkan, kita dapat mengakses data itu. Kami menyusun indikator, mengidentifikasi data, elemen data. Indikator ini baru dari Perludem saja.

Izza (SPD)

Penyakit CSO kalau kita membuat program, biasanya hanya berkumpul dengan CSO lain. Kita juga harus melibatkan publik juga, misalnya dengan melakukan survey untuk mengetahui baseline-nya, misalnya disabilitas, masyarakat adat, perempuan, pemuda, data apa yang dibutuhkan. Soal dapil dalam open data KPU sudah ada, tetapi apakah data yang ditampilkan sudah cukup? Kaitannya dengan parpol, apakah parpol bersedia memberikan datanya, apakah KPU di daerah juga bersedia memberikan datanya. Harapan masyarakat, keterbukaan data juga meningkatkan partisipasi masyarakat.

Darwanto (Fasilitator)

Usul melakukan survei kepada masyarakat. Apakah perlu ada MoU KPU dengan masyarakat sipil untuk mempublikasikan data pemilu yang dibutuhkan masyarakat, apakah memungkinkan? Hal ini sebagai bentuk komitmen melaksanakan rencana aksi.

Titi Anggraini

Sejauh ini sudah ada 2 kali MoU dengan KPU, pada saat ketua KPU Husni Kamil Manik dan Arief Budiman untuk mendorong keterbukaan data di KPU dan digitalisasi data. Dari mulai kita dengan OGI, lebih banyak interaksi dengan Pak Viryan. Produk ini bukan produk Perludem. Dukungan dari platform juga didapatkan. Proses ini lama sekali, bukan tiba-tiba. Keterbukaan data di KPU cukup diapresiasi. Penyelenggara Pemilu di Myanmar ingin meng-copy keterbukaan data. Kami ingin komitmen keterbukaan data terinternalisasi di penyelenggara pemilu. Kita berharap ini menjadi kolaborasi kita bersama dengan CSO. Kita ingin meningkatkan derajat keterbukaannya. Success story ini harus terus dilanjutkan.

Maharddhika

Komitmen kami dalam workshop adalah mengundang teman-teman yang punya concern terhadap data tersebut. Teman-teman yang punya concern terhadap data hasil pemilu, misalnya Netgrit mengetahui sangat banyak di soal itu. Perludem membuka ruangnya, kita coba tulis dan rekomendasikan ke KPU.

Hadar Nafis Gumay

Usulan teman SPD baik saja. Kita bicara data yang ada di KPU, data itu bisa dipelajari terkait dengan undang-undang dan peraturannya. Kita berharap ada perbaikan macam datanya, tetapi itu terikat dengan undang-undang. Kita bisa melihat data-datanya, bisa membuat workshop sekali lagi, masing-masing mendalami detail data seperti apa yang diinginkan, kemudian disampaikan ke KPU. Misalnya ketika kita mengklik peta dapil, ada data anggota DPR, DPRD-nya. Penting juga kita realistis, karena Pemilu 2024 juga sudah dekat.

Darwanto (Fasilitator)

Survei bisa dilakukan sendiri, nanti hasilnya dibawa pada saat workshop.

Data dukung B06.2 apakah cukup dalam sistem informasi parpol bisa diakses?

Theo

Target B06 kita perlu membedakan jenis data dalam profil parpol apa saja yang diperlukan. Di dalam matriks belum tergambar. Data set apa saja. Data dukung akan mudah kalau aksinya jelas.

Maharddhika

Perludem sudah mengelola beberapa data, profilparpol, profil peserta, hasil pemilu, tapi sebatas yang disediakan KPU. Tetapi kita mau level up dari situ, ke depan elemen data dapat diakomodasi di peraturan KPU.

Theo

Terkait data dukung, bagaimana rencana kerja KPU? Lead untuk 6 bulan pertama, Perludem dan CSO, kemudian KPU mengikuti workshopnya.

Titi Anggraini

Semua data yang diharapkan tersedia ini disebutkan dalam undang-undang Pemilu. Kita jangan berpikir seolah-olah kita ini KPU, barriernya jelas antara masyarakat sipil dengan KPU. Masukan Mas Theo benar

sekali, kita harus realistis. Harapan terkait profil parpol, apakah hanya profilnya saja atau data-data pemenuhan persyaratan dari Pasal 173?

Theo

Dari workshop pertama sudah tertulis di matriks, perlu ada informasi jika caleg businessmen bisnisnya apa saja. Motivasi pencalonan perlu diubah.

Kalau soal parpol, daftar pengurus nama-namanya yang di daerah. Profil pengurus, riwayat hidupnya.

Ada putusan MK terkait mantan narapidana koruptor, agar dicantumkan dalam form riwayat hidup.

Anto (TII)

Bagaimana kita mendampingi KPU, problem KPU tidak hanya menampilkan data, tetapi ada masalah SDM, anggaran, dll. CSO harus tetap galak, agar open data tetap dijalankan. Apa yang bisa kita lakukan untuk KPU, apakah melalui pertemuan rutin, melihat bagaimana perkembangan. SIPOL kita apresiasi karena bisa diakses masyarakat, meskipun AD/ART parpol belum bisa diklik.

Darwanto (Fasilitator)

Di Open Government, CSO tidak hanya mengusulkan, tetapi bertanggung jawab juga melaksanakan.

Coffee Break

Betty Epsilon Idroos (KPU RI)

Inisiatif Keterbukaan Data Pemilu Pada Rencana Kerja 2023/2024

Roadmap Transparansi Informasi KPU

1. Penerapan Peraturan Hukum Tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Digitalisasi data pemilu
3. Implementasi Open Data

Data Pemilu Terbuka opendata.kpu.go.id.

Jumlah dataset KPU:

1. Data pemilih: 6 dataset
2. Data wilayah: 6 dataset
3. Hasil perolehan suara: 4 dataset
4. Badan ad hoc: 5 dataset
5. Logistik: 3 dataset

6. Partai Politik: 7 dataset
7. Dana kampanye: 6 dataset
8. Evaluasi dan pelaporan: 4 dataset

KPU akan memberikan akses API pada Open data KPU sebagai salah satu keterbukaan data yang dapat langsung diolah oleh publik.

Dalam sebuah data set terdapat: judul, deskripsi, sumber data, pratinjau, informasi tambahan.

Format data: csv dan excel.

Manajerial sistem informasi/pelayanan digital KPU berbasis siklus pemilu pra-election, election dan post-election.

Pengelolaan dan Integrasi Data:

1. Prinsip pengelolaan data dan informasi
2. Prinsip integrasi data dan informasi
3. Kriteria data dan informasi

Penggunaan data dan informasi wajib memperhatikan Perlindungan Data Pribadi

Sistem informasi kepiluan di KPU: Sipol, Sidakam, Sidapil, Silon, Sirekap, Siakba, Silog, Sidalih.

Portal sharing data dan informasi: <https://infopemilu.kpu.go.id>

Zero data sharing policy untuk menjamin tidak adanya berbagi-pakai data yang bersumber dari hak akses verifikasi data kependudukan Dukcapil.

Upaya KPU menjamin keamanan data pribadi para calon pemilih:

1. Daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap yang diumumkan dan dibagikan hanya memuat informasi pribadi yang bersifat umum, yaitu nama, jenis kelamin, usia dan alamat.
2. Fitur pencarian keterdaftaran pemilih sudah diperketat dengan pencarian menggunakan NIK dan kabko, serta hasil pencarian hanya menampilkan nama, jenis kelamin, tempat TPS
3. Pengembangan TIK untuk enkripsi data
4. Pengembangan sistem informasi untuk implementasi pengamanan data pribadi
5. Perbaikan tata cara penyimpanan data pemilih
6. Perbaikan tata cara penyediaan data pengumuman

Gugus tugas keamanan data: KPU, Cyber Crime Mabes Polri, BRIN, BSSN, Kominfo, BIN.

Darwanto (Fasilitator)

Yang dilakukan Perludem dan Koalisi di isu pemilu dan demokrasi, tidak jauh dengan yang dilakukan oleh KPU. Apa yang akan dilakukan KPU tergambar di roadmapnya. CSO akan memberikan masukan/input dan akan kebersamai. Seknas OGI mengkomunikasikan dengan Satu Data Indonesia bagaimana

standardisasi data. Juni 2023 profil parpol, peta dapil harapannya sudah dipublikasikan dengan format data terbuka.

Apakah mungkin 2024 seluruh informasi bisa diakses teman-teman difabel?

Betty E. Idroos (KPU RI)

Peta dapil bentuknya image, tidak bisa pakai API ☒ Sidapil (9 Februari 2023)

Profil partai Politik (14 Desember) - > Sipol

Profil peserta pemilu ☒ Silon DPD 6 desember- September 2023

Laporan dana kampanye: 3 jenis laporan seminggu setelah ada hasil pemilu

Hasil pemilu: secara berjenjang (Sirekap, bukan hasil resmi)

KPU tidak dapat bekerja sendiri, kami berharap mendapatkan masukan mengenai indeks adopsi digital sebagai bahan untuk memperbaiki diri.

Untuk yang difabel, sepertinya belum ada.

Rahma (Suarise)

Kami sedang berkoordinasi dengan Kominfo terkait Permen tentang aksesibilitas digital, disabilitas kesulitan mendapatkan informasi caleg.

Anwar

Kita berkejaran dengan tahapan yang sedang berjalan.

Betty E. Idroos (KPU RI)

Menyesuaikan dengan PKPU 3/2022 ada dalam jalur jadwal kami. Misalnya profil parpol, SIPOL selesai 14 Desember.

Hadar Nafis Gumay (Netgrit)

Kelihatannya akan keren ke depan, tapi kalau kita detailkan jangan-jangan kita punya perbedaan pandangan/harapan mengenai data ini. Ada data-data yang sudah dimiliki dan sudah berjalan, diperlukan untuk kita ketahui. Antar sub tahapan ada banyak info, ada partai tertentu tidak lolos administrasi, kenapa dia tidak lolos, data itu tidak dibuka. Kenapa KPU tidak membuka data ini? Kalau data ini dibuka akan melindungi KPU sendiri.

CV ke depan tergantung caleg akan membuka/tidak. Pengalaman 2014, kami nekad diumumkan yang tidak mau membuka. Data bisa ditutup sebagian. KPU me-list saja siapa yang mau/tidak mau membuka.

Betty E. Idroos (KPU RI)

Untuk proses yang sekarang tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. 2022 SIPOL fully dipergunakan oleh parpol. Data parpol baru dibuka setelah ditetapkan 14 Desember.

Titi Anggraini

Pada Pemilu 2019 data yang diupload parpol bisa diakses publik.

Betty E. Idroos (KPU RI)

Terkait CV, ketika menjadi KPU DKI, kami pernah disengketakan di Komisi Informasi terkait hal-hal informasi pribadi.

Hadar Nafis Gumay (Netgrit)

Saya hanya berharap semakin baik, semakin terbuka data-data ini.

Nurfatah (JPPR)

Keterbukaan data pada tahapan pemilu ada pra-pemilu, pemilu, pasca-pemilu. Yang sudah dilakukan tracking calon KPU, pemantauan pendaftaran parpol. Dalam verifikasi administrasi, kami mencari data peserta pemilu, tetapi kami tidak menemukan. Kami menemukan partai parlemen masih melakukan pencatutan nama masyarakat. Apakah partai parlemen memang sudah memenuhi syarat peserta pemilu, karena datanya tidak ada. Di lapangan, parpol juga belum siap mendukung ekosistem civic tech, keterbukaan data.

Anto (TII)

Jangan-jangan ada perbedaan pandangan, ketika kita melihat data mendorong transparansi dengan data sekedar dokumentasi. Kita perlu menyamakan persepsi.

Terkait integrasi data, portal open data tidak real time, tidak dilink ke web KPU.

Betty E. Idroos (KPU RI)

Hanya partai non parlemen karena merujuk putusan MK.

Kami mendapat imbauan dari Bawaslu yang dicatut namanya minta dihapuskan. Keterbukaan informasi publik sepanjang masih on process belum bisa dipublikasikan. Datanya masih on process, data Sipol belum dibuka karena masih proses perbaikan, tetapi data ini dapat dibuka di Bawaslu. Data belum bisa diopen karena masih ada perbaikan-perbaikan.

Darwanto (Fasilitator)

Dalam workshop selanjutnya mengundang Komisi Informasi Publik dan Komisi Perlindungan Data Pribadi, juga Pusdatin KPU.

Titi Anggraini

Harapan proses dialog ini berlanjut dan jika memungkinkan berasal dari inisiatif KPU. Bagaimana isu ini dilihat bukan sebagai ownership Perludem, tetapi ownership bersama untuk pemilu yang lebih baik. Proses ini diharapkan berlanjut terus, diharapkan nantinya KPU yang mengundang masyarakat sipil untuk sinergitas dan kokreasi kita di mana mendatang.

Darwanto (Fasilitator)

Secara teknis akan dibahas dengan Pusdatin terkait pembicaraan teknis.

-o0o-

DOKUMENTASI



